



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**JL. ARUJI KARTAWINATA NO 23 TELP. (0232(8711135)
KUNINGAN 45511**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Aruji Kartawinata No. 23 Telp/Fax (0232) 871135
KUNINGAN

Kode pos 45511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 800.1.1/KPTS.1353/DISKOPDAGPERIN/2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 175 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.
3. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kuningan bidang koperasi UKM dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan menengah Daerah untuk periode Tahun 2024-2026, merupakan pedoman perencanaan pembangunan serta implementasi dari periode terakhir RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2025.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RENJA merupakan:

- a. Dokumen Perencanaan Dinas Untuk priode tahun 2025 yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025; dan
- b. Penjabaran dari RPJPD, RPD dan RENSTRA 2024-2026 yang memuat :
 1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Penutup.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RENJA yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Tahun 2025.
- (2) Tujuan penetapan RENJA adalah untuk :
 - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran renstra dinas;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 4

- (1) Dokumen RENJA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari 1 (satu) buku yang memuat tentang;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f) Pengembangan daerah terisolir,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

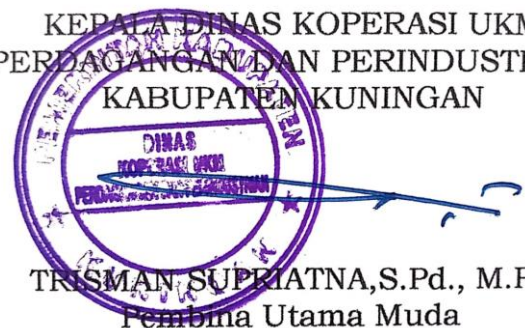
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan menjadi pedoman acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab semua pihak terkait sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuningan, Agustus 2024

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN



TRISMAN SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Landasan Hukum	I.2
1.3	Maksud dan Tujuan	I.4
1.4	Sistematika Penulisan	I.5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.9
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	II.26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.29
2.5	Penelaahan Usulan Rancangan dan Kegiatan Masyarakat	II.43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III.1
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	III.3
3.3	Program Kegiatan	III.4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV.1

BAB V PENUTUP V.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026 Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan. Pada rancangan awal rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, baik di Kabupaten Kuningan, tingkat provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2025 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja (Renja Kerja) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuningan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 1 tahun 2024 Tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai bahan evaluasi dan koreksi SKPD untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 yaitu tersedianya pedoman penyusunan

strategi pencapaian target kinerja urusan Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2023 dihadapkan dengan target yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan semuanya dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, hampir semuanya memenuhi target sampai ada kinerja melampaui target adapun ada beberapa program/kegiatan tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa program/kegiatan kena revocusing anggaran.
2. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Pasar dan UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan dari Retribusi Sebesar **Rp.733.291.106,-** dengan realisasi Rp.590.630.853,- atau 80,55%

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kuningan

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab.Kuningan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /Tahun berjalan/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah (-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	01	01		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	25 Unit Usaha	492 Unit	520 Unit	520 Unit	100%	20 Unit Usaha	537 Unit Usaha	2.685%
1	01	01	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	492 Unit	520 Unit	520 Unit	100%	20 Unit Usaha	537 Unit Usaha	2.685%
1	01	02		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	75 Unit Usaha	100 Unit	100 Unit	50 Unit	50 %	75 Unit Usaha	85 Unit Usaha	113,33%
1	01	02	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi,	75 Unit Usaha	100 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	75 Unit	85 Unit	113,33%

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /Tahun berjalan/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah (- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	01	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Jumlah Koperasi Modern	50 orang	-	-	-	-	50 Orang	70 orang	140%
1	01	05	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah	50 orang	-	-	-	-	50 Orang	70 Orang	140%
1	01	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Jumlah UKM Binaan	3.391 unit usaha	1.317 Unit	300 Unit	400 Unit	133,33%	100 unit	254 unit	254%
1	01	06	01	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.391 unit usaha	1.317 Unit	300 Unit	400 Unit	133,33%	100 unit	254 unit	254%
1	01	07		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	250 unit usaha	200 UKM	100 UKM	400 UKM	400%	200 unit	563 unit	281%
1	01	07	01	Pengembangan usaha mikro dengan orientaasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	250 unit usaha	200 UKM	100 UKM	400 UKM	400%	200 unit	563 unit	281%

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /Tahun berjalan/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah (-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2	02	03		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.882.802 US\$	7.507.845,65 US\$	4.958.557 '88 US\$	3.608.007 US\$	72,76 %	1.772.802 US\$	3.579.914 US\$	201.93%
2	02	03	01	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.8822.802 US\$	7.507.845,65 US\$	4.958.557 '88 US\$	3.608.007 US\$	72,76 %	1.772.802 US\$	3.579.914 US\$ perNovemb er 2024	201,93%
2	02	04		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan Jumlah Alat-Alat UKUR, Takar Timbang dan Perlengkapannya/(UTTP) yang ditera/tera ulang	5.000 unit	6.392 UTTP	5.400 UTTP	5.525 UTTP	102,31%	5000 UTTP	5528 UTTP	110%
2	02	04	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Terlaksananya pelaksanaan mertologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	5.000 unit	6.392 UTTP	5.400 UTTP	5.525 UTTP	102,31%	5000 UTTP	5528 UTTP	110%
2	02	05		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah Yang Dipromosikan	50 produk	250 Produk	30 Produk	346 Produk	1.153,33%	50 Produk	352 produk	704%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /Tahun berjalan/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah (-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2	02	05	01	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Terlaksananya Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50 produk	250 Produk	30 Produk	346 Produk	1.153,33%	50 Produk	352 Produk	704%
2	03			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
2	03	01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Pertumbuhan Industri	2 %	-	-	-	-	2 %	2%	100%
2	03	01	01	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	2 %	-	-	-	-	2 %	2%	100%
								-	-	-			
2	03	02		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	03	02	01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000.000	-	-	-	-	2.31%	2,31%	100%

Tahun 2025

*Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan*

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 /Tahun berjalan/n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah (- 2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
2	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan Jumlah Pendataan SIINas	50 dokumen	40 Industri	100 Industri	500 Industri	500%	%0 Dokumen	77 Dokumen	154%
2	03	03	01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kuningan/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50 dokumen	40 Industri	100 Industri	500 Industri	500%	50 Dokumen	77 Dokumen	154%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam rancangan pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 karena belum ada visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan terpilih, yang mana pada RPD ini mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Pada tahun 2024 menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul dan produktif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan.
2. Tahun 2025 mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. pembangunan menargetkan perwujudan keadilan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat kabupaten kuningan dapat meningkat secara merata.
3. Pada tahun 2026 mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya saing. pada tahap ini Kabupaten Kuningan berharap memasuki level pembangunan yang baru. sebagai motor dan wilayah pariwisata unggulan di bagian timur Jawa Barat maka Kabupaten Kuningan akan menjadi leading sektor dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Koperasi Aktif			10 unit	500 unit	510 unit	520 unit	10 unit	351 unit	492 unit	520 unit	20 unit usaha	25 unit usaha	
2.	Jumlah Koperasi Sehat			65 unit	100 unit	100 unit	100 unit	60 unit	75 unit	100 unit	50 unit	75 unit usaha	75 unit usaha	
3.	Jumlah Koperasi Binaan			75 unit	100 unit	100 unit	100 unit	-	300 unit	100 unit	100 unit	50 orang	50 unit usaha	
4.	Jumlah Koperasi Modern			-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	50 orang	
5.	Jumlah UKM Binaan			150 UKM	200 UKM	250 UKM	300 UKM	100 UKM	464 UKM	1.317 UKM	400 UKM	100 unit usaha	10 unit usaha	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			60 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	150 UKM	200 UKM	400 UKM	200 unit usaha	250 unit usaha	
7.	Jumlah UKM yang memperoleh bantuan modal mikro			10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	2366 UKM	15 UKM	9 UKM	-	-	
8.	Wirausaha baru			50 orang	150 orang	200 orang	200 orang	100 orang	262 orang	220 orang	480 orang	-	-	
9.	Jumlah variasi produk unggulan UMKM			10 produk	30 produk	30 produk	30 produk	10 produk	36 produk	30 produk	30 produk	-	-	
10.	Jumlah Desa Kuliner Tradisional Pinunjul			0	1 desa	0	0	0	0	1 desa	0	-	-	
11.	Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI			1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	0	1 pasar	4 pasar	1 pasar	1 unit	1 unit	
12.	Persentase Nilai PDRB Sektor			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perdagangan													
13.	Optimalisasi pelayanan pasar			7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	3 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	-	-	
14.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang			5.250 UTTP	5.300 UTTP	5.350 UTTP	5.400 UTTP	3.924 UTTP	4.500 UTTP	6.392 UTTP	5.525 UTTP	5000 UTTP	5000 UTTP	
15.	Jumlah Pengawasan alat UTTP			32 Kecamatan	32 Kecamatan	32 Kecamatan	32 Kecamatan	32 Kecamatan	32	32	12	-	-	
16.	Jumlah penyediaan sarana pendukung Metrologi legal			0	0	1 paket	1 paket	0	0	0	0	-	-	
17.	Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan			30 produk	30 produk	30 produk	30 produk	50 produk	40 produk	250 produk	346 produk	50 produk	50 produk	
18.	Jumlah pameran yang			2 event	4 event	4 event	4 event	2 event	1 event	4 event	3 event	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dilaksanakan													
19.	Optimalisasi pelayanan informasi perdagangan			0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	-	-	
20.	Nilai ekspor perdagangan			4.958.557'88 US\$	4.958.557'88 US\$	4.958.557'88 US\$	4.958.557'88 US\$	4.686.494'88 US\$	4.305.627 US\$	7.507.845,65 US\$	3.608.007US\$	1.772.802 USS\$	1.882.802 US\$	
21.	Jumlah pameran komoditi ekspor	Event		0	1 Event	1 Event	1 Event	0	0	1 Evet	0	-	-	
22.	Jumlah pelaku usaha potensi ekspor			30 orang	100 orang	100 orang	100 orang	30 orang	30 orang	100 orang	100 orang	-	-	
23.	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah			1 event	1 event	1 event	1 event	7 event	2 event	8	1 event	5 Laporan	5 Laporan	
24.	Jumlah pertumbuhan IKM			30 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	30 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	-	-	
25.	Jumlah			25 IKM	9 IKM	22 IKM	10 IKM	20 IKM	15 IKM	22 IKM	10 IKM	-	-	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	peningkatan produk IKM													
26.	Jumlah IKM penerima mesin dan peralatan			30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	21 IKM	202 IKM	22 IKM	37 IKM	-	-	
27.	Peningkatan daya saing untuk produk home industri dan kemasan			30 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	30 IKM	145 IKM	135 IKM	135 IKM	-	-	
28.	Jumlah wirausaha berbasis pesantren			2/40 IKM	2/40 IKM	2/40 IKM	2/40 IKM	2/24 IKM	4/40 IKM	8/40 IKM	79/79 IKM	-	-	
29.	Kajian dan pengawasan izin usaha industri, standar industri dan industri 4.0			25 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	20 Perusahaan	40 Perusahaan	65 Perusahaan	40 Perusahaan	-	-	
30.	Pertumbuhan Industri			-	-	-	-		-	-	-	2 %	2 %	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2020 (thn-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thnn+1)	Tahun 2024 (thn n-)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
31.	Nilai PDRB Industri Pengolahan			-	-	-	-	-	-	-	-	2.31 %	Rp1.500.000.000,-	
32.	Jumlah pendataan SIINas	Industri		14 Industri	60 Industri	100 Industri	100 Industri	12 Industri	130 Industri	40 Industri	500 Industri	50 Dokumen	50 Dokumen	

Adapun untuk rancangan rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2025-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Target Restra Perangkat Daerah (Revisi)	
			2025	2026
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai ASN	Persen	100%	100%
2.	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	25%	25%
	Persentase UMKM Naik Kelas	Persen	10%	10%
3.	Persentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4%	4%
4.	Nilai PDRB industri Pengolahan	Rupiah	Rp.1.500.000.000	Rp.1.600.000.000

Tabel. 2.2
Pencapaian PAD Dinas Koperasi, KM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
Tahun 2019 -2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KET.
2019	517.308.423	522.574.456	101.02	
2020	487.903.888	542.675.000	111.23	
2021	482.403.888	523.429.269	108.50	
2022	554.265.100	534.327.450	96.40	
2023	733.291.106	590.630.853	80.55	
2024	587.255.405	614.239.300	104,59	

Pembiayaan tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan mendapat alokasi dana/anggaran sebesar **Rp. 24.111.882.508;-** dengan 12 (dua belas) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

A	BELANJA OPERASI	:	24.106.282.508
1.	Belanja Pegawai	:	7.361.199.631
2.	Belanja Barang dan Jasa	:	14.435.082.877
3.	Belanja Hibah	:	2.310.000.000
B	BELANJA MODAL	:	5.600.000
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	5.600.000
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	0
	Jumlah Belanja		24.111.882.508

Pembiayaan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel :2.3

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023**

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
1	2	4	5	6	7
	BELANJA	24.111.882.508	21.523.916.152	89,27	100
A	Belanja Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.443.522.330	18.912.213.976	88,20	100
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.963.191.750	8.781.620.358	97,97	100
2.	Urusan Bidang Koperasi dan UKM	12.480.330.580	10.130.593.616	81,17	100
B.	Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.828.245.178	1.812.871.178	99.16	100
C	Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	840.155.000	798.831.000	95.09	100
A	BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21.443.522.330	18.912.213.975	88,20	100
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.963.191.750	8.781.620.358	97,97	100
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	77.819.820	97,27	100
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	100	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	47.819.820	95,64	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.353.399.631	7.187.507.913	97,74	100
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.353.399.631	7.187.507.913	97,74	100
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	476.500.000	472.090.000	99,07	100
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	35.000.000	100	100
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	60.000.000	100	100
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	35.000.000	100	100
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	100	100
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	45.000.000	100	100
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	70.000.000	100	100
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.500.000	147.090.000	97,09	100
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	825.292.119	822.365.725	99,65	100
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.676.519	133.271.725	99,70	100
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	691.615.600	689.094.000	99,64	100
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.000.000	221.836.900	97,30	100
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.000.000	95.836.900	93,96	100
14.	Pemeliharaan Mebel	26.000.000	26.000.000	100	100
15.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100	100
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100	100
	URUSAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.480.330.580	10.130.593.616	81,17	100
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SMPAN PINJAM	100.000.000	100.000.000	100	100
VI	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang , Cabang	100.000.000	100.000.000	100	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
	Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
17.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100	100
03.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000	50.000.000	100	100
VII.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100	100
18.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100	100
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	906.770.000	781.770.000	86,21	100
VIII.	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	906.770.000	781.770.000	86,21	100
19.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	906.770.000	781.770.000	86,21	100
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11.142.260.330	9.017.763.616	80,93	100
IX	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	11.142.260.330	9.017.763.616	80,93	100
20.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	11.042.260.330	8.917.763.616	80,76	100
21.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100.000.000	100.000.000	100	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
06.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	281.300.250	181.060.000	64,37	100
X	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	281.300.250	181.060.000	64,37	100
22.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desaian dan Teknologi	281.300.250	181.060.000	64,37	100
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.828.245.178	1.812.871.178	99,16	100
07.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	805.711.678	805.279.678	99,95	100
XI.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	805.711.678	805.279.678	99,95	100
23.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	716.196.678	715.764.6768	99,94	100
24.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	89.515.000	89.515.000	100	100
08.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	650.000.000	635.058.000	97,70	100
XII.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	650.000.000	635.058.000	97,70	100
25.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	650.000.000	635.058.000	97,70	100
09.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	222.533.500	222.533.500	100	100
XIII	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	222.533.500	222.533.500	100	100
26.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	152.533.500	152.533.500	100	100
27.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	70.000.000	70.000.000	100	100
10.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	150.000.000	150.000.000	100	100
XIV	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peninfkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	150.000.000	150.000.000	100	100
28.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
29.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100	100
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	840.115.000	798.831.000	95,09	100
14	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	820.000.000	778.831.000	94,98	100
XIX.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	820.000.000	778.831.000	94,98	100
30.	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	820.000.000	778.831.000	94,98	100
15.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	20.115.000	20.000.000	99,43	100
XX.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.115.000	20.000.000	99,43	100
31.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.045.000	10.000.000	99,45	100
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, PUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.070.000	10.000.000	99,30	100

Melihat data tabel diatas pada tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memiliki anggaran sebesar **Rp.24.111.882.508;-** dengan realisasi **Rp.21.523.916.152;-** atau **89,27%.**

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan untuk Tahun Anggaran 2024 direncanakan dengan anggaran **Rp.21.536.884.140,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.536.884.140
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.511.884.140
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	11.101.884.140
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.200.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.200.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.950.234.140
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.950.234.140
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.000.000
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	135.000.000
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000
3.4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	100.000.000
3.5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	200.000.000
3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.669.200
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.669.200
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	870.780.800
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.780.800
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.000.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000
6.2	Pemeliharaan Mebel	25.000.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000

NO 1	PROGRAM/KEGIATAN 2	PAGU ANGGARAN (Rp) 3
II.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten Kuningan	50.000.000
1.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
1.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	50.000.000
V.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggoataan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan komptensi SDM Koperasi	50.000.00
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	175.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.000.00
1.	Peningaktan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewengan Kabupaten/Kota	175.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3
VII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.960.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	7.960.000.000
1.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	130.000.000
2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	7.210.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-
4.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	620.000.000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100.000.000
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	100.000.000
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	100.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.099.000.000
IXI.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	450.000.000
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	450.000.000
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	250.000.000
2.	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	200.000.000
X.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.000.000
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	250.000.000
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegarsi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0
2.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam1 (satu) Kabuapten /Kota	250.000.000
XI.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000
	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk eskpor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	100.000.000
1.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	0
2.	Pameran Dagang Nasional	100.000.000
3.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	0

NO 1	PROGRAM/KEGIATAN 2	PAGU ANGGARAN (Rp) 3
XII.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	199.000.000
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	199.000.000
1.	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	124.000.000
2.	Pengawasan atau penyuluhan metrologi legal	75.000.000
XIII.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.000.000
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100.000.000
1.	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100.000.000
2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	950.000.000
XIV.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	850.000.000
	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	850.000.000
1.	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	150.000.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	700.000.000
XV.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
1.	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem online Sigle Submission Risk base Approach (OSS RBA)	50.000.000
XVI.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
1.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	50.000.000

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dilakukan melalui pendataan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dinas, permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan pembangunan urusan wajib Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Kuningan, diantaranya :

1. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadi anggota koperasi;
2. Tantangan baru yang dihadapi dunia perkoperasian daerah, tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru ditengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis;
3. Permasalahan UMKM umumnya dalam permodalan ketika produknya bagus, produknya banyak diminati, namun ketika ada tawaran kemitraan tersandung masalah permodalan kemudahan akses kredit dari perbankan/non perbankan , bagi UMKM star up/wirausaha pemula menjadi perhatian utama;
4. Minimnya inovasi bisnis yang membuat banyak pelaku UMKM jalan ditempat dalam mengembangkan usahanya. Akhirnya banyak usaha yang tidak dapat bertahan lama, produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing;
5. Masih banyak pelaku UMKM yang masih gagap teknologi, masih diperlukannya pendampingan dalam digitalisasi dalam pengembangan UMKM baik dalam manajemen usaha maupun pemasaran;
6. Kemampuan pelaku usaha dalam kemasan produk barang/jasa masih perlu pendampingan untuk meningkatkan daya saing;
7. Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan pasar daerah dan pasar desa;
8. Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

9. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan dan pengembangan ekspor;
10. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kuningan sebagai daerah konservasi memerlukan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri non polutan, berbentuk klaster dan pembangunan IPAL bagi industri kecil menimbulkan polusi;
11. Masih rendahnya industri memiliki sertifikasi produksi;
12. Masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi sistem informasi industri nasional (SIINas);

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya brand position dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai lembaga ekonomi;
2. Koperasi di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance) yakni prinsip-prinsip yang mendasarai suatu proses dan mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis;
3. Kurang pahamnya pelaku usaha dalam pengajuan akses kredit;
4. Para pelaku usaha tidak mau keluar dari zona nyaman;
5. Kurangnya kemauan dan fasilitas penunjang untuk belajar teknologi;
6. Kurang Pemahaman para pelaku usaha, masih berpikir secara tradisional dengan menggunakan kemasan biasa;
7. Pembinaan dan pengembangan pasar rakyat harus dilaksanakan sesuai empat prinsip yaitu :
 - a. Pembangunan/revitalisasi fisik
 - b. Pembangunan/revitalisasi manajemen
 - c. Pembangunan/revitalisasi ekonomi dan

d. Pembangunan/revitalisasi sosial

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya aspek fisik namun juga aspek non fisik yang dibentuk maupun diperbaiki.

8. Potensial konsumen pasar domestik yang tinggi perlu diimbangi dengan kesadaran konsumen yang semakin meningkat pula. Upaya peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen perlu terus dilakukan agar masyarakat menjadi konsumen cerdas. Konsumen memiliki karakteristik menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan;
9. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi usaha produk unggulan Kabupaten Kuningan yang berpotensi ekspor;
10. Masih kurangnya lahan kawasan peruntukan industri;
11. Masih kurang pahamnya para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi industri;
12. Belum terlalu berjalan program pengawasan terhadap kegiatan industri, dampak dari kemudahan perizinan dan pelaporan dalam aplikasi sistem informasi industri nasional (SIINas);

c. Faktor Pendorong :

1. Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik yang dilakukan oleh penyelenggara infrastruktur publik yang diserahkan kepada masyarakat;
2. Koperasi mendapat prioritas sebagai pengelola tempat promosi pengembangan UMKM pada infrastuktur publik.
 - Hak pengelolaan tempat promosi dan Pengembangan UMKM diberikan kepada koperasi setelah dilakukan seleksi oleh Kementerian atau Dinas terkait
3. Saat ini banyak perbankkan yang memberikan pinjaman mikro untuk para pelaku usaha
4. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha;

5. Banyaknya pelatihan kepada pelaku usaha tentang digitalisasi teknologi;
6. Pelatihan dan penyuluhan mengenai desain kemasan;
7. Pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat dilakukan dalam upaya mendukung perbaikan pola distribusi perdagangan dari hulu ke hilir sehingga terciptanya keseimbangan permintaan dan penawaran yang berujung pada kestabilan harga bahan pokok di masing-masing wilayah.
8. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Edukasi terhadap konsumen disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan mengubah posisi konsumen menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri;
9. Melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan promosi sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk potensi ekspor;
10. Pembebasan lahan kawasan peruntukan industri di daerah pinggiran kota;
11. Diadakannya pelatihan dan penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha;
12. Diadakannya penyuluhan/pendampingan kepada para pelaku usaha;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah salah satu acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, selain Renstra Perangkat Daerah. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh Perangkat Daerah untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Perangkat Daerah terkini.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada dan tentu tidak luput dari beberapa perubahan terutama dengan adanya penambahan kegiatan yang berasal dari usulan kecamatan dan

pokir dewan melalui aplikasi namun karena adanya keterbatasan anggaran tidak semua di verifikasi. Sebagai mana terlihat pada tabel T C.31 berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan
(APBD Kabupaten/Bantuan Keuangan)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				118.599.201					118.599.201	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB										
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				101.724.201					101.724.201	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian		10.379.201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian		10.379.201	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	75.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	125.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	40.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Laporan	40.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	35.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	35.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi APBD Perangkat Daerah	100 %	7.869.201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi APBD Perangkat Daerah	100%	7.869.201	
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Kuningan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu)	84/14 orang/bulan	7.869.201	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Kuningan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu)	84/14 orang/bulan	7.869.201	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presantase Kebutuhan Prasarana dan sarana yang terpenuhi	100%	825.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presantase Kebutuhan Prasarana dan sarana yang terpenuhi	100%	825.000	
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kuningan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	600 paket	50.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kuningan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	600 paket	50.000	
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Kuningan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	30 Paket	150.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.Kuningan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	30 Paket	150.000	
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kuningan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	70.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kuningan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	70.000	
7.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab.Kuningan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	265 Paket	100.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab.Kuningan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	265 Paket	100.000	
8.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kab.Kuningan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 paket	180.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kab.Kuningan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 paket	180.000	
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kuningan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	43 dokumen	75.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kuningan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	43 dokumen	75.000	
10.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kuningan	(Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat	210 laporan	200.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kuningan	(Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat	210 laporan	200.000	
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Sarana Perkantoran	100%	160.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Sarana Perkantoran	100%	160.000	
11.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab.Kuningan	Jumlah Unit Kendaraan dinas	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kuningan	Jumlah Unit Kendaraan dinas	1 unit	-	
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		(Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit	160.000			(Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit	160.000	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase unit kerja yang terpenuhi	100%	945.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Presentase unit kerja yang terpenuhi	100%	945.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi			Pemerintah Daerah		Kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi			
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kuningan	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, kebersihan dan keamanan kantor	12 laporan	235.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kuningan	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, kebersihan dan keamanan kantor	12 laporan	235.000	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuningan	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	710.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuningan	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	710.000	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	100%	505.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	100%	505.000	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuningan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	23 unit	250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuningan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	23 unit	250.000	
16.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kuningan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	70 unit	30.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kuningan	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	70 unit	30.000	
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuningan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	175.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kuningan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	175.000	
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuningan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kuningan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	50.000	
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang memenuhi standar		175.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang memenuhi standar		175.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor	30%	175.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor	30%	175.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koperasi Dengan wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi).			Koperasi Dengan wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi).			
19.	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kuningan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	175.000	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kuningan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	175.000	
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan		250.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan		250.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam	25%	250.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam	25%	250.000	
20.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kuningan	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 unit usaha	250.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kuningan	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 unit usaha	250.000	
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP		200.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP		200.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1		Persentase Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	25%	200.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya		Persentase Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	25%	200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
20.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Kabupaten Kuningan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	75 unit usaha	200.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Kab.Kuningan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	75 unit usaha	200.000	
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase diadakannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		250.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase diadakannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		250.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Diadakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	30%	250.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Diadakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	30%	250.000	
21.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM	Kab. Kuningan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 unit usaha	250.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM	Kabupaten Kuningan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 unit usaha	250.000	
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		500.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50%	500.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50%	500.000	
22.	Peningkatan produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab.Kuningan	Jumlah Unit Usaha yang produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5 unit	500.000	Peningkatan produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Kuningan	Jumlah Unit Usaha yang produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5 unit	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Porsentase peningkatan UMKM Binaan		76.520.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Porsentase peningkatan UMKM Binaan		76.520.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Porsentase dilaksanakannya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing	40%	76.520.000	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Porsentase dilaksanakannya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing	40%	76.520.000	
23.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kuningan	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25 unit usaha	1.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kuningan	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25 unit usaha	1.000.000	
24.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	25 unit usaha	73.520.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	25 unit usaha	73.520.000	
25.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Degan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kuningan	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	25 orang	1.000.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Degan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kuningan	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	25 orang	1.000.000	
26.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang	1.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang	1.000.000	
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil		13.450.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil		13.450.000	
	Pengembangan usaha mikro dengan orientaasi		Porsentase difasilitasi alur usaha untuk UMKM	20%	13.450.000	Pengembangan usaha mikro dengan orientaasi		Porsentase difasilitasi alur usaha untuk UMKM	20%	13.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan			peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan			
27.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	13.450.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	13.450.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.875.000					16.875.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.875.000					15.875.000	
09	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase sarana perdagangan		13.350.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase sarana perdagangan		13.350.000	
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	13.350.000	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	13.350.000	
28.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kuningan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	12.500.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kuningan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	12.500.000	
29.	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kuningan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	850.000	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Kuningan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	850.000	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		1.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah		1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota		Prosentase Pelaksanaan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	100%	1.000.000	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota		Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.000.000	
30.	Pemnatauan Harga dan Stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab.Kuningan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	100.000	Pemnatauan Harga dan Stock barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab.Kuningan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	100.000	
31..	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam1 (satu) Kabuapten /Kota	Kab.Kuningan	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	900.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam1 (satu) Kabuapten /Kota	Kab. Kuningan	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	900.000	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase nilai ekspor bersih perdagangan		800.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Prosentase nilai ekspor bersih perdagangan		800.000	
	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah kabupaten/kota		Prosentase pameran dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50%	800.000	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah kabupaten/kota		Prosentase pameran dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50%	800.000	
32.	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kuningan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.882.802 (7 pelaku usaha))	400.000	Pameran Dagang Nasional	Kab.Kuningan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.882.802 (7 pelaku usaha))	400.000	
33.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kuningan	Jumlah Produk Unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi		400.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab.Kuningan	Jumlah Produk Unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi		400.000	
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN		Jumlah Alat-alat Ukur Takar Timbang dan		275.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN		Jumlah Alat-alat Ukur Takar Timbang dan		275.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KONSUMEN		perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang			PERLINDUNGAN KONSUMEN		perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang			
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan		Persentase kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan kemetrolagian	100%	275.000	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan		Persentase kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan kemetrolagian	100%	275.000	
34..	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Kab. Kuningan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.000 unit	165.000	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Kab. Kuningan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.000 unit	165.000	
35.	Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Kab. Kuningan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	5.000 unit/orang	110.000	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Kab. Kuningan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	5.000 unit/orang	110.000	
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan		450.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan		450.000	
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		Prosentase produk unggulan daerah yang dipromosikan	50 %	450.000	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		Prosentase produk unggulan daerah yang dipromosikan	50 %	450.000	
36.	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Kab. Kuningan	Jumlah UMKM yang memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 produk UKM	225.000	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Kab. Kuningan	Jumlah UMKM yang memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 produk UKM	225.000	
37.	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Kab. Kuningan	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	225.000	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Kab. Kuningan	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	225.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.000.000					1.000.000	
14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Porsentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK		750.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Porsentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK		750.000	
	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Porsentase dilaksanakannya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra Porsentase disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10%	750.000	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Porsentase dilaksanakannya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra Porsentase disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10%	750.000	
38..	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	250.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	250.000	
39.	Koordinasi Dan Sikronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indutri	1dokumen	250.000	Koordinasi Dan Sikronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Kab.Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indutri	1dokumen	250.000	
40.	Koordinasi Dan Sikronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Indrustri dan Peran serta Masyarakat	Kab.Kuningan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	250.000	Koordinasi Dan Sikronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Indrustri dan Peran serta Masyarakat	Kab.Kuningan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Porsentase peningkatan informasi bagi para IKM /perusahaan terkait izin usaha industri		100.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Porsentase peningkatan informasi bagi para IKM /perusahaan terkait izin usaha industri		100.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Porsentase dilaksanakannya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	2,22 %	100.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Porsentase dilaksanakannya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	2,22%	100.000	
41.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Informasi industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA)	Kab. Kuningan	Jumlah Dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA) bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah	5 dokumen	100.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Informasi industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA)	Kab. Kuningan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Informasi industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA) bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	5 dokumen	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pusat								
16.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Porsentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan		150.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Porsentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan		150.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kuningan/Kota		Porsentase dilaksanakannya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	50%	150.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kuningan/Kota		Porsentase dilaksanakannya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	50%	150.000	
42.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Dan Publikasi Data Informasi Dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	50 dokumen	150.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINaso	Kab. Kuningan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Dan Publikasi Data Informasi Dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	50 dokumen	150.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Perkoperasian, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T.C.32

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kuningan

SKPD : Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Peningkatan Jumlah UKM Binaan		
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
1.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Sumberjaya Kec.Ciwaru	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan mesin pencacah/pemecah/pelebur plastik menjadi biji plastik satu set untuk UMKM di Desa Sumberjaya Kec. Ciwaru (Pokir DPRD)
2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Pamijahan Kec. Ciawigebang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan gas 3Kg di Desa Pamijahan Kec. Ciawigebang (Pokir DPRD)
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Bojong Kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan peralatan laptop untuk UMKM Erlangga Desa Bojong Kec. Cilimus (Pokir DPRD)
4..	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Prasmanan Kelurahan Cigugur Kec. Cigugur	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan alat Prasmanan Kelurahan Cigugur Kec. Cigugur (Pokir DPRD)
5.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Bojong Kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan alat mesin Garmen untuk Kelompok Fadila Desain Desa Bojong Kec. Cilimus (Pokir DPRD)
6.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Kecamatan Kadugede,	Jumlah unit usaha yang telah menerima	1 paket	Pengadaan alat prasmanan tersebar di Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Darma, Kecamatan Selajambe	pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		Kadugede, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan Darma, Kecamatan Selajambe (Pokir DPRD)
7.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel.Purwawinangun Kec.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Dana Hibah Untuk Kelompok Bisababakti Purwawinangun (Pokir DPRD)
8.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel.Cigintung Kec.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Dana Hibah Untuk Kelompok Hikmah Fajar Cigintung (Pokir DPRD)
9.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel.Cijoho Kec.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Dana Hibah Untuk Kelompok Dua Cendana Cijoho (Pokir DPRD)
10.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Kuningan, Cigugur, Sindangagung, Garawangi dan Ciniru	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Permodalan UMKM untuk Kelompok Wijaya Bisa Kecamatan Kuningan, Cigugur, Sindangagung, Garawangi dan Ciniru (Pokir DPRD)
11.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa bandorasakulon Kec.Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah bantuan permodalan UMKM Desa bandorasakulon Kec.Cilimus (Pokir DPRD)
12.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dapil 2 Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan peralatan UMKM tersebar di Dapil 2 Kuningan (Pokir DPRD)
13.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Kramatmulya dan Kec. Mandirancan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan Peralatan UMKM di Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Kramatmulya dan Kec. Mandirancan (Pokir DPRD)
14.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Luragung, Kec. Ciwaru, Kec. Cimahi	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan UMKM Kec. Luragung, Kec. Ciwaru, Kec. Cimahi (Pokir DPRD)
15.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dapil 1 Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan sarana produksi UMKM di Dapil 1(Pokir DPRD)
16.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana,Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana Untuk 20 PKL di Obyek Wisata Cibulan.Desda Maniskidul Kecamatan Jalaksana,Kab.Kuningan (Pokir DPRD)
17.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana Usaha Cuci Mobil dan Motor Kelompok Tunas Remaja.Desda Maniskidul Kecamatan Jalaksana (Pokir DPRD)
18.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cileuya Kecamatan Cimahi, Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya bagi UMKM dan IKM IKM Sablon dan Konveksi CeremeRCH Dusun Manis RT 02 RW 05 Desa Cileuya (Pokir DPRD)
19.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya, Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya bagi UMKM dan IKM (Solusi Store) Dusun Puhun RT 001 RW 03 Nomor 16 Desa Cikaso (Pokir DPRD)Kecamatan Kramatmulya, Kab. Kuningan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Puhun RT 01 RW 03 No. 16 Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya, Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya bagi UMKM dan IKM (Koperasi Solusi Sinar Niaga) Dusun Puhun RT 01 RW 03 No. 16 Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya, Kab. Kuningan (Pokir DPRD)
21.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya bagi UMKM dan IKM Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan (Pokir DPRD)
22.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Pelaku Usaha Sandines Krystal Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana (Pokir DPRD)
23.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana Bagi Pelaku Usaha Solusi Store. Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya (Pokir DPRD)
24.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	JL Veteran No.62 Jagabaya, Kec. Kuningan Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Permudalan UMKM Kelompok "Untukmu" JL Veteran No.62 Jagabaya, Kec. Kuningan Kab. Kuningan (Pokir DPRD)
25.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Segong Kec. Karangancana	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Desa Segong Kec. Karangancana (Pokir DPRD)
26.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel. Kuningan Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah UMKM Kelompok "Putra Mandiri" Kel. Kuningan Kec. Kuningan (Pokir DPRD)
27.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Ciomas Kec. Ciawigebang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Permodalan UMKM Penjahit Desa Ciomas Kec. Ciawigebang (Pokir DPRD)
28.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Ciawigebang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Permodalan UMKM Las di Kec. Ciawigebang (Pokir DPRD)
29.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel. Cijoho Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Kel. Cijoho Kec. Kuningan (Pokir DPRD)
30.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan (Pokir DPRD)
31.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Caracas Kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Desa Caracas Kec. Cilimus (Pokir DPRD)
32.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel. Kuningan Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Digital Printing Kel. Kuningan Kec. Kuningan (Pokir DPRD)
33.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Sindangsuka Kec. Luragung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Anugrah Water Desa Sindangsuka Kec. Luragung (Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			usaha mikro		
34.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Dukuhipicung Kec.Luragung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Taruna Muda Sukses Bersama Desa Dukuhipicung Kec.Luragung (Pokir DPRD)
35.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cigedang Kec.Luragung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Golono Krispi Desa Cigedang Kec.Luragung (Pokir DPRD)
36.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cileya Kec.Cimahi	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Permodalan UMKM Saung Ambu Desa Cileya Kec.Cimahi (Pokir DPRD)
37.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Kuningan, Cigugur, Sindangagung, Ciniru,Hantara, Garawangi	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Pengadaan UMKM Kec.Kuningan, Cigugur, Sindangagung, Ciniru,Hantara, Garawangi (Pokir DPRD)
38.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Kadugede	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Produksi UMKM di Kec.Kadugede (Pokir DPRD)
39.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Nusaherang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Produksi UMKM di Kec.Nusaherang (Pokir DPRD)
40.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Darma	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Produksi UMKM di Kec.Darma (Pokir DPRD)
41.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Karangkencana,Cibeureum,Cibingbin	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM Kec.Karangkencana,Cibeureum, Cibingbin (Pokir DPRD)
42.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Cibingbin,Cibeureum,Karangkencana	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Alat Kesenian Tradisional dan Modern Sanggar/Kelompok Seni Kec.Cibingbin,Cibeureum,Karangkencana (Pokir DPRD)
43.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Kramatmulya, Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Cigandamekar, Pancalang, Pasawahan,Japara	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM di Kec.Kramatmulya, Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Cigandamekar, Pancalang, Pasawahan,Japara (Pokir DPRD)
44.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Darma Kec.Darma	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Kelompok UMKM di Desa Darma Kec.Darma (Pokir DPRD)
45.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel.Cigugur Kec.Cigugur	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Kelompok UMKM di Kel.Cigugur Kec.Cigugur (Pokir DPRD)
46.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kertaungaran Kec.Sindangagung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Permodalan UMKM kelompok UMKM desa Kertaungaran Kec.Sindangagung (Pokir DPRD)
47.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Timbang Kec.Cigandamekar	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan UMKM Kelompok UMKM Desa Timbang Kec.Cigandamekar (Pokir DPRD)
48.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Bandorasakulon Kec.Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima	1 paket	Hibah Bantuan UMKM Kelompok UMKM Bandorasakulon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Usaha Mikro		pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		Kec.Cilimus (Pokir DPRD)
49.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Pokir DPRD)
50.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Modal UMKM untuk Masyarakat Kab Kuningan (Pokir DPRD)
51.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	bantuan modal untuk umkm di kab kuningan (Pokir DPRD)
52.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Jalaksana Kec Jalaksana Kab Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Modal Usaha Kelompok Ibu Ibu Majelis Taklim Akhwat Desa Jalaksana Kec Jalaksana Kab Kuningan (Pokir DPRD)
53.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan sarana produksi usaha Komunitas Gerakan Kita Kuningan (Pokir DPRD)
54.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Modal untuk UMKM di kab kuningan (Pokir DPRD)
55.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan sarana produksi Kelompok PKL Munjul Kuningan (Pokir DPRD)
56.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Kramatmulya , Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Cigandamekar, Kec. Japara, Kec. Pasawahan, Kec. Mandirancan, Kec. Pancalang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Permodalan tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di Kec. Kramatmulya , Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Cigandamekar, Kec. Japara, Kec. Pasawahan, Kec. Mandirancan, Kec. Pancalang (Pokir DPRD)
57.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Bojong kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Bojong kec. Cilimus (Pokir DPRD)
58.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cilimus kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Cilimus kec. Cilimus (Pokir DPRD)
59.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Linggamekar kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Linggamekar kec. Cilimus (Pokir DPRD)
60.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Setianegara kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Setianegara kec. Cilimus (Pokir DPRD)
61.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Linggarjati kec. Cilimus	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Linggarjati kec. Cilimus (Pokir DPRD)
62.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Desa Indapatra kec. Cigandamekar	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Indapatra kec. Cigandamekar (Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mikro		pendampingan terhadap usaha mikro		
63.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Timbang kec. Cigandamekar	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Timbang kec. Cigandamekar (Pokir DPRD)
64.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Rajadanu kec. Japara	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Rajadanu kec. Japara (Pokir DPRD)
65.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Sumbakeling kec. Pancalang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Sumbakeling kec. Pancalang (Pokir DPRD)
66.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Patalagan kec. Pancalang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM di Desa Patalagan kec. Pancalang (Pokir DPRD)
67.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Awirarangan Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Kelurahan Awirarangan Kec. Kuningan (Pokir DPRD)
68.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kelurahan Citangtu	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Kelurahan Citangtu (Pokir DPRD)
69.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cibuang Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Desa Cibuang (Pokir DPRD)
70.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Lingk. Lebakburang, Kel/Kec. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Lingk. Lebakburang, kec. Citangtu (Pokir DPRD)
71.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Lingk. Cipicung Kel. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Lingk. Cipicung Kel. Kuningan (Pokir DPRD)
72.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Puncak Kec. Cigugur	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah Modal UMKM Desa Puncak (Pokir DPRD)
73.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Lingk. Awirarangan Kel. Awirarangan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel (Kelompok Tiga Putra) Lingk. Awirarangan Kel. Awirarangan (Pokir DPRD)
74.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kertaungaran Kec. Sindangagung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Hibah UMKM Kelompok Wargi Sehati Desa Kertaungaran Kec. Sindangagung (Pokir DPRD)
75.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kabupaten Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Pelaku UMKM Tersebar di Kabupaten Kuningan (Pokir DPRD)
76.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kabupaten Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Pelaku UMKM Tersebar di Kabupaten Kuningan (Pokir DPRD)
77.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Pasar Ciawigebang	Jumlah unit usaha yang telah menerima	1 paket	Pengadaan gerobak kayu UMKM untuk Pedagang Pasar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Usaha Mikro		pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		Ciawigebang (Pokir DPRD)
78.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Garawangi, Kec. Kuningan, Kec. Sindangagung, Kec. Hantara, Kec. Ciniiru, Kec. Cigugur	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Pengadaan alat UMKM tersebar di Dapil 1 (Kec. Garawangi, Kec. Kuningan, Kec. Sindangagung, Kec. Hantara, Kec. Ciniiru, Kec. Cigugur) (Pokir DPRD)
79.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM Tersebar Se-Dapil 2	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan UMKM Tersebar Se-Dapil 2 (Pokir DPRD)
80.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Karangancana, Kec. Ciwaru dan Kec. Luragung	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Pelaku UMKM tersebar di Kec. Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Karangancana, Kec. Ciwaru dan Kec. Luragung (Pokir DPRD)
81.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Cibingbin Kec. Cibingbin	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Permodalan untuk Koperasi Sarasi Desa Cibingbin Kec. Cibingbin (Pokir DPRD)
82.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Wage Desa Kadugede Kec. Kadugede	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Modal UMKM Kelompok Bani Imam Dusun Wage Desa Kadugede Kec. Kadugede (Pokir DPRD)
83.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Nangka Kec. Kadugede	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Modal UMKM Kelompok Nangka Jaya Desa Nangka Kec. Kadugede (Pokir DPRD)
84.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Wage Desa Windujanten Kec. Kadugede	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Hibah Bantuan Modal UMKM Kelompok Sri Dewi Jaya Dusun Wage Desa Windujanten Kec. Kadugede (Pokir DPRD)
85.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa jatimulya Kec. Cidahu	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan modal usaha kelompok usaha desa jatimulya Kec. Cidahu (Pokir DPRD)
86.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	bantuan alat usaha UMKM di kab kuningan (Pokir DPRD)
87.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersebar di Kab.Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan sarana prasarana untuk lembaga usaha pedesaan di kab kuningan (Pokir DPRD)
88.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	LP Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan sarana prasarana untuk lembaga masyarakat di kab kuningan (Pokir DPRD)
89.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Kramatmulya , Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Cigandamekar, Kec. Japara, Kec. Pasawahan, Kec. Mandirancan, Kec. Pancalang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Permodalan tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di Kec. Kramatmulya , Kec. Jalaksana, Kec. Cilimus, Kec. Cigandamekar, Kec. Japara, Kec. Pasawahan, Kec. Mandirancan, Kec. Pancalang (Pokir DPRD)
90.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Maniskidul Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana, Kab. Kuningan	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1 paket	Bantuan Sarana Prasarana dan Pendukung Lainnya bagi UMKM dan IKM Kelompok Usaha Srikandi Maniskidul Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana, Kab. Kuningan (Pokir DPRD)

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan pengembangan Perkoperasian, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tidak lepas dari melihat perkembangan pembangunan nasional dibidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, berdasarkan arah kebijakan dan program strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian berikut adalah arah kebijakan nasional :

**3.1.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang Koperasi dan
UKM**

Arah dan kebijakan strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan RPJMN 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024, maka arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (Scalling Up)

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkat-kan penciptaan peluang usaha dan start-up

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM

**3.Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi
Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).**

3.1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang Perdagangan

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.1.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Kebijakan pemberdayaan industri
4. Kebijakan pemberdayaan industri

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam rangka membreakdown tujuan pada renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian maka capaian tujuan tersebut dituangkan pada tujuan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas
2. Terwujudnya koperasi serta wirausaha yang tumbuh, mandiri dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya UMKM yang mandiri, naik kelas dan berdaya saing
4. Terwujudnya pertumbuhan sektor perdagangan
5. Terwujudnya industri yang berdaya saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan selama kurun waktu 2024 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
2. Meningkatkan kapasitas bagi wirausaha koperasi melalui pendampingan dan pelatihan.
3. Meningkatkan UMKM yang lebih sejahtera
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan
6. Meningkatkan industri ramah lingkungan dan padat karya

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningantahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Awal	Sasaran		Akhir Renstra
				2025	2026				2022	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas	Capaian nilai Sakip Diskopda gperin	Predikat	B	B	Terwujudnya pemenuhan sarana prasarana kinerja pegawai, kinerja keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kinerja pegawai ASN, kinerja keuangan	Persen	100	100	100	100
2.	Mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah koperasi berkualitas	Unit usaha	25	25	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	Persen	25	25	25	25
3.	Terwujudnya UMKM yang mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10	10	Meningkatnya Kinerja koperasi dan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	Persen	65	10	10	10
4.	Terwujudnya pertumbuhan sector perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	US\$	1.882.802	1.992.802	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Persentase Nilai PDRB sektor perdagangan	Persen	4	4	4	4
5.	Terwujudnya industry yang berdaya saing	Laju pertumbuhan industri Pengolahan	persen	2,34	2,34	Meningkatnya PDRB industry pengolahan	Nilai PDRB industry pengolahan	Rupiah	110 M	1.5 M	1,6	4,26

3.3 Program dan Kegiatan

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai focus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan pada setiap misi, tetapi karena belum ada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2025 memuat program-program prioritas yang merupakan program utama yang menjadi tanggung jawab

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam rancangan pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 karena belum ada visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan terpilih. Pada tahun 2025 diprioritaskan menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul dan produktif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji dalam RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 untuk OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 16 (enam belas) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.Total pagu indikatif/kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp.118.599.201.170,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten.

Berikut disampaikan rincian keenam belas program berikut pagu indikatifnya tersebut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

I. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 (enam) kegiatan dan terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.10.379.201.170,-
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan 1(satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.175.000.000,-
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,-
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,-

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,-
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,-
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan 1 (satu) kegiatan dan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.76.520.000.000,-
8. Program Pengembangan UMKM dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan Pagu anggaran Rp.13.450.000.000,-

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ini terdiri dari 5 (lima) program dengan 5 (lima) kegiatan dan terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.15.875.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.13.350.000.000,-
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.000.000.000,-
3. Program Pengembangan Ekspor dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.800.000.000,-
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan 2 (dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.275.000.000,-
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.450.000.000,-

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terdiri dari 3 (tiga) Program dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.000.000.000,-dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.750.000.000,-
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,-
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,-

Rumusan Rencana Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 yang terdiri dari 16 (enam belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan berikut perkiraan maju dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kuningan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				101.724.201.170			28.726.007.299
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian			10.379.201.170			15.576.007.299
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		B	75.000.000		B	500.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskopdagp rin	25 Dokumen	40.000.000	Pendapata n Asli Daerah(PA D)	25 Dokumen	250.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perangkat Daerah yang disusun	Diskopdagp rin	20 Laporan	35.000.000		20 Laporan	250.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi APBD Perangkat Daerah		100 %	7.869.201.170		100%	10.078507.299

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu)		84/14 orang/bulan	7.869.201.170	DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kinerja	84/14 orang/bulan	10.078.507.299
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presantase Kebutuhan Prasarana dan sarana yang terpenuhi		100%	825.000.000		100%	2.052.000.000
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		600 paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	600 paket	300.000.000
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan		30 Paket	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30 Paket	300.000.000
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Paket	252.000.000
7.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		265 Paket	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	265 Paket	300.000.000
8.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		15 paket	180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15 Paket	250.000.000
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan yang disediakan		43 dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32 dokumen	300.000.000
10.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	(Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat		210 laporan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	210 laporan	350.000.000
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi		100%	160.000.000		100%	295.500.000
11.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas		1 unit				
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1 unit	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 unit	295.500.000
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase unit kerja yang terpenuhi Kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi		100%	945.000.000		100%	1.250.000.000
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, kebersihan dan keamanan kantor		12 laporan	235.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	350.000.000
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor		12 laporan	710.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 laporan	900.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik		100%	505.000.000		100%	1.400.000.000
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya		23 unit	250.000.000		23 unit	350.000.000
16.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara		70 unit	30.000.000		70 unit	350.000.000
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	175.000.000		1 unit	350.000.000
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara		1 unit	50.000.000		1 unit	350.000.000
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB							
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang memenuhi standar			175.000.000			200.000.000
VII	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi).		30%	175.000.000		30%	200.000.000
19.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kuningan	5 unit usaha	175.000.000		5 unit koperasi	200.000.000
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan			250.000.000			250.000.000
VIII	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam		25%	250.000.000		25%	250.000.000
20.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kabupaten Kuningan	45 unit usaha	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45 Unit Usaha	250.000.000
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP			200.000.000			250.000.000
IX	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Kabupaten Kuningan	25%	200.000.000		25%	250.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pinjam Koperasi						
21.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabuapten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Kuningan	75 unit usaha	200.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	75 unit usaha	250.000.000
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase diadakannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			250.000.000			250.000.000
X	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Diadakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi		30%	250.000.000		30%	250.000.000
22.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		50 unit usaha	250.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	50 unit usaha	250.000.000
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			500.000.000			500.000.000
XI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		25%	500.000.000		25%	500.000.000
23.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha produktif, bernilai tambah memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan, manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Kabupaten Kuningan	5 unit	500.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	5 unit	500.000.000
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Porsentase peningkatan UMKM Binaan			76.520.000.000			9.200.000.000
XII	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Porsentase dilaksanakannya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing		40%	76.520.000.000		40%	9.200.000.000
24.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kuningan	25 unit usaha	1.000.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	25 unit usaha	1.500.000.000
25.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kabupaten Kuningan	25 unit usaha	73.520.000.000	Pendapata n Asli Daerah (PAD)	25 unit usaha	5.700.000.000
26	Koordinasi Dan Sinkronisasi Degan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan	Kabupaten Kuningan	25 orang	1.000.000.000	Pendapata n Asli Daerah	25 orang	1.000.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro				(PAD)		
27.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Kabupaten Kuningan	25 orang	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25 orang	1.000.000.000
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			13.450.000.000			2.500.000.000
XIII	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase difasilitasi nya alur usaha untuk UMKM melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan		20%	13.450.000.000		20%	2.500.000.000
28.	Produksi dan Penolakan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kuningan	100 unit usaha	13.450.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan	100 unit usaha	2.500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.875.000.000			
a.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN BIDANG PERDAGANGAN				15.875.000.000			5.952.500.000
09	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase sarana perdagangan			3.350.000.000			3.350.000.000
XIV	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		100%	13.350.000.000			3.350.000.000
29.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Kuningan	1 unit	12.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan	1 unit	2.500.000.000
30.	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Kuningan	1 laporan	850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 laporan	850.000.000
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			1.000.000.000			1.000.000.000
XV	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Prosentase Pelaksanaan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota		100%	1.000.000.000		100%	1.000.000.000
31.	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan	Kabupaten Kuningan	1 laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah	1 laporan	100.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				(PAD)		
32.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabuapten /Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Kuningan	1 laporan	900.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 laporan	900.000.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase nilai ekspor bersih perdagangan			800.000.000			850.000.000
XVI	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pameran dagang produk ekspor unggulan yang diikuti		50%	800.000.000		50%	850.000.000
32	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang		1.882.802 (7 pelaku usaha)	400.000.000		1.882.802 (7 pelaku usaha)	425.000.000
33	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi			400.000.000			425.000.000
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat-alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang			275.000.000			302.200.000
XVI I	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan kemetrolagian		100%	275.000.000		100%	302.000.000
34.	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ulang		5.000 unit	165.000.000		5000 unit	181.500.000
35.	Pengawasan atau penyuluhan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina		5.000 unit/orang	110.000.000		5.000 unit/orang	121.000.000
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan			450.000.000			450.000.000
XVI II	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Prosentase produk unggulan daerah yang dipromosikan		50%	450.000.000		50%	450.000.000
36	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupate/Kota	Kabupaten Kuningan	50 produk UKM	225.000.000		50 produk UKM	225.000.000
37	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan	Kabupaten Kuningan	50 UMKM	225.000.000		50 UMKM	225.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi						
b.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.000.000.000			1.000.000.000
14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK			750.000.000			750.000.000
XIX	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase dilaksanakannya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra Persentase disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		10 %	750.000.000		10 %	750.000.000
38.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Kuningan	1 dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	250.000.000
39.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Kuningan	1dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1dokumen	250.000.000
40.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	250.000.000		1 dokumen	250.000.000
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan informasi bagi para IKM /perusahaan terkait izin usaha industri			100.000.000			100.000.000
XX	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUII), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase dilaksanakannya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan		5 %	100.000.000		5 %	100.000.000
41.	Fasilitas verifikasi Pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah – tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha	Kabupaten Kuningan	Dokumen/2,22%	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dokumen/2,22%	100.000.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
16.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Porsentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan			150.000.000			150.000.000
XXI	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kuningan/Kota	Porsentase dilaksanakannya pembuatan SIINAS dan pelaporannya		5%	150.000.000		5%	150.000.000
42.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Indusri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Dan Publikasi Data Informasi Dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kabupaten Kuningan	50 dokumen	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah(PAD)	50 dokumen	150.000.000
TOTAL					118.599.201.170.			35.678.507.299

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Restra Dinas dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD Provinsi). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuningan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			101.724.201.170		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks RB Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian		10.379.201.170		
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	75.000.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	40.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	20 Laporan	35.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi APBD Perangkat Daerah	100 %	7.869.201.170		
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84/14 orang/bulan	7.869.201.170	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presantase Kebutuhan Prasarana dan sarana yang terpenuhi	100%	825.000.000		
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	600 paket	50.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30 Paket	150.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	265 Paket	100.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	15 paket	180.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dolkumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	43 dokumen	75.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	210 laporan	200.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	100%	160.000.000		
11.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas				
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit	160.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Presentase unit kerja yang terpenuhi Kebutuhan	100%	945.000.000		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
	Pemerintah Daerah	pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, Front office, driver dan komunikasi terpenuhi				
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	235.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	710.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	100%	505.000.000		
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	70 unit	30.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	175.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB					
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang memenuhi standar		175.000.000		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi).	30%	175.000.000		
19.	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	175.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan		250.000.000		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam	25%	250.000.000		
20.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang di Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 unit usaha	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP		250.000.000		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	25%	250.000.000		
21.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	75 unit usaha	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase diadakannya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		250.000.000		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diadakan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	30%	250.000.000		
22.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 unit usaha	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		500.000.000		
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25%	500.000.000		
23.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi	5 unit	500.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan UMKM Binaan		76.520.000.000		
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase dilaksanakannya fasilitas untuk UMKM melalui permodalan, komunitas, legalitas usaha, legalitas produk dan daya saing	40%	76.520.000.000		
24.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25 unit usaha	1.000.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
25.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	25 unit usaha	73.520.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
26.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	25 orang	1.000.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
27.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang	1.000.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil		13.450.000.000		
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase difasilitasi alur usaha untuk UMKM melalui penguatan SDM, proses produksi, pemasaran, dan kemasan	20%	13.450.000.000		
28.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia pengembangan produksi dan pengolahan,serta desain dan teknologi	100 unit usaha	13.450.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.875.000.000		
a.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN BIDANG PERDAGANGAN			15.875.000.000		
09	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase sarana perdagangan		13.350.000.000		
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	13.350.000.000		
29.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	12.500.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan
30.	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	850.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		1.000.000.000		
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Pelaksanaan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	100%	1.000.000.000		
31.	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	100.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
32.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam1 (satu) Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	900.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase nilai ekspor bersih perdagangan		800.000.000		
	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	Persentase pameran dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50%	800.000.000		
33.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1.882.802 (7 pelaku usaha)	400.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
34.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi		400.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat-alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera Ulang		275.000.000		
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Persentase kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan kemetrolagian	100%	275.000.000		
35.	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	5.000 unit	165.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
36.	Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal yang di bina	5.000.000 unit/orang	110.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Produk Unggulan Daerah yang dipromosikan		450.000.000		
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Prosentase produk unggulan daerah yang dipromosikan	50%	450.000.000		
37.	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 produk UKM	225.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
38.	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	225.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.000.000.000		
14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Porsentase peningkatan penguatan IKM dan dokumen RPIK		750.000.000		
	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Porsentase dilaksanakannya penguatan IKM dari sisi SDM terampil, peralatan produksi yang lebih modern dan peningkatan sentra Porsentase disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10%	750.000.000		
39.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
40.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indutri	1 dokumen	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
41.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri	1 dokumen	250.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana
			Target	Pagu		
		dan Peran Serta Masyarakat				
15	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Porsentase peningkatan informasi bagi para IKM /perusahaan terkait izin usaha industri	5%	100.000.000		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase dilaksanakannya sosialisasi mengenai standarisasi industri, perluasan industri, dan pengawasan	2,22 %	100.000.000		
42.	Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSSRBA, bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dn industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Dokumen/2,22%	100.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Porsentase peningkatan penggunaan aplikasi SIINAS bagi para IKM/perusahaan		150.000.000		
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kuningan/Kota	Porsentase dilaksanakannya pembuatan SIINAS dan pelaporannya	5%	150.000.000		
42.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Dan Publikasi Data Informasi Dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	50 dokumen	150.000.000	Kab.Kuningan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Total Belanja				118.599.201.170		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Rencana Kerja (Renja) Dinas merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas wajib berpedoman pada Renstra Dinas .
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Dinas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

